

TAJUK RENCANA

Optimalisasi Pengawasan Mudik Lokal

KONTROVERSI seputar boleh tidaknya mudik lokal masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Terkait hal itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan Surat Edaran No 27/SEN/2021 tentang Ketentuan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah di Wilayah Aglomerasi Yogyakarta Raya dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19. SE yang berlaku sejak 8 Mei hingga 24 Mei 2021 tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan selama ini menyangkut boleh tidaknya mudik lokal pada masa Lebaran.

Bila dicermati isinya, SE Gubernur DIY terasa sangat hati-hati dalam mengatur mobilitas masyarakat selama Lebaran. Tentu ini sangat bisa dimengerti dan dipahami mengingat pengalaman lonjakan kasus positif Covid-19 usai libur panjang. Diakui, lonjakan jumlah kasus sangat signifikan pascalibur. Ini tak boleh terulang lagi pada masa Lebaran. Oleh karena itu, momentum Lebaran harus diawasi ketat terutama menyangkut mobilitas warga yang hendak melakukan perjalanan antarkabupaten/kota di wilayah DIY.

SE Gubernur DIY tidak melarang warga melakukan perjalanan antarkabupaten/kota di wilayah DIY. Namun untuk melakukan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri warga harus terlebih dulu melakukan rapid test PCR/Antigen/GeNose dan selalu menjaga protokol kesehatan. Poin ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang melakukan perjalanan antarkabupaten/kota saja tapi juga mereka yang bersilaturahmi ke tetangga, mereka atau kerabat, meski masih satu kabupaten/kota. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan menginap.

Lantas, siapa yang mengawasi aktivi-

tas warga dalam bersilaturahmi berkaitan Hari Raya Idul Fitri ? Hal itu dijawab pada poin empat SE Gubernur, yakni optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko Covid-19 kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akan melakukan silaturahmi.

Secara substansi, SE Gubernur No 27 Tahun 2021 ini sangat baik dan tepat sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya lebih banyak mengandalkan Posko Covid-19 tingkat kelurahan. Pertanyaannya, apakah cara ini efektif ? Siapakah Satgas Covid-19 di tingkat kelurahan mengawasi setiap mobilitas warganya ? Dengan jumlah personel yang terbatas, agaknya Satgas akan kedodoran kalau harus mengcover seluruh warga yang hendak bersilaturahmi, baik ke tetangga maupun kerabat.

Berkaitan itulah Satgas di tingkat RT/RW harus dioptimalkan fungsi dan perannya. Sebab, merekalah ujung tombak keberhasilan dalam mengawasi mobilitas warganya. Sedang menjalankan tugas dan fungsinya Satgas juga harus didukung penuh pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat. Namun fungsi mereka takkan optimal tanpa dukungan masyarakat. Artinya, masyarakat tetap menjadi faktor terpenting dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

Jadi, poin terpenting dari pengendalian penyebaran Covid-19 adalah kesadaran masyarakat untuk konsisten menerapkan prokes. Jika kesadaran itu telah tumbuh dan mengakar, niscaya tanpa diawasi sekalipun mereka tetap taat pada prokses. Sebab, mereka telah menyadari bahwa penerapan prokes bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. □

SETIAP tahun, saat menyambut Idul Fitri umat Islam dikhawatirkan dengan perbedaan permulaan jatuhnya Idul Fitri. Menurut *Islamic Crescent Observation Project* (ICOP) terdapat 22 negara yang menetapkan awal Ramadan 1442 H jatuh Selasa (13/4). Dan ada 10 negara yang menetapkan awal Ramadan 1442 H hari Rabu (14/4). Salah satu anggota MABIMS (Menteri Agama-Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) yang mengikuti pandangan kedua adalah Brunei Darussalam karena Senin (12/4) tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal di Wilayah Brunei Darussalam.

Di Australia terjadi perbedaan dalam mengawali Ramadan 1442 H/2021M. Kelompok yang mengikuti fatwa Dewan Ulama Australia (*Australian Fatwa Council*) yang ditandatangani Dr Ibrahim Abu Muhammad menetapkan awal Ramadan 1442 H Selasa (13/4). Sedangkan kelompok yang mengikuti keputusan Moonsighting Australia tertanggal 12 April 2021 dan ditandatangani Dr Shabbir Ahmed menetapkan awal Ramadan 1442 H Rabu (14/4). Karena Senin (12/4) hilal tidak terlihat di Seluruh Wilayah Australia.

Begitu pula di Indonesia meskipun Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah mengawali Ramadan 1442 H/2021 M secara serempak namun dalam praktiknya terjadi perbedaan. Yaitu an-Nadzir memulai puasa Ramadan 1442 H lebih awal, Senin (12/4).

Awal Syawal

Selanjutnya dalam penentuan awal Syawal 1442 H berbagai kalender Islam yang beredar di belahan dunia mayoritas menetapkan awal Syawal 1442 H hari Kamis (13/5). Kalender Islam dimaksud antara lain kalender Islam yang beredar di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Saudi Arabia, Turki, Nigeria, Amerika, Inggris, dan Australia. Dalam praktiknya tidak semua negara mengikuti apa yang su-

Susiknan Azhari

dah tertera dalam kalender Islam yang dipedomani, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, dan Saudi Arabia.

Fatwa Dewan Ulama Australia yang ditandatangani Dr Ibrahim Abu Muhammad tertanggal 8 Mei 2021 menetapkan awal Syawal 1442 H jatuh hari Kamis (13/5). Fatwa ini sejalan dengan kalender Islam yang berkembang di Australia, sedangkan *Moonsighting Australia* dan Brunei Darussalam masih menunggu hasil rukyat Rabu(12/5) petang. Jika para pemburu



hilal tidak berhasil melihat hilal maka awal Syawal 1442 H jatuh pada hari Jumat (14/5).

Sementara itu di Indonesia berdasarkan data hisab dari berbagai aliran yang berkembang menunjukkan bahwa 29 Ramadan 1442 H yang bertepatan Selasa (11/5) posisi hilal di bawah ufuk (negatif) dan belum terjadi ijtima' (konjungsi). Secara teoretik data ini menjelaskan hilal tidak mungkin teramat. Sekalipun ada yang berhasil melihat hilal laporannya akan ditolak. Disisi lain Selasa (11/5) Kementerian Agama RI akan menyelenggarakan

Sidang Isbat yang akan dipimpin Menteri Agama RI Yaquut Cholil Coumas untuk menentukan awal Syawal 1442 H.

Relevankah

Lalu masih relevankah sidang isbat menunggu hasil rukyat? Kasus semacam ini bukanlah yang pertama. Kondisi awal Syawal 1442 H sama dengan tahun lalu. Pengalaman membuktikan jika posisi hilal memenuhi syarat visibilitas hilal MABIMS maka ada laporan keberhasilan melihat hilal meskipun autentisitasnya masih dipertanyakan, contohnya hilal awal Ramadan 1442 H. Begitu juga jika posisi hilal di bawah ufuk maka tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal.

Dalam posisi dilematis di masa pandemi ini kearifan dan kemashlahatan perlu dipertimbangkan, khususnya para pengguna rukyat untuk membuka ruang sebagai langkah awal menuju penyatuan. Beberapa hari yang lalu salah satu media di Timur Tengah melaporkan bahwa Saudi Arabia dalam menentukan awal Syawal 1442 H menggunakan istikmal karena secara astronomis hilal masih di bawah ufuk. Jika berita ini benar maka bisa dijadikan rujukan dalam sidang isbat nanti. Sehingga kualitas sidang Isbat tidak diragukan lagi. □

*) **Prof Dr. Susiknan Azhari,**

Guru Besar Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Museum Astronomi Islam.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Peniadaan Mudik, Peluang Turunkan Kasus Covid

PEMERINTAH beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan surat edaran tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan tertuang dalam SE Nomor 13/2021 ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan ini tepat dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Sebagian yang lain beranggapan kebijakan tersebut tidak tepat. Karena mudik sudah menjadi budaya. Sehingga masyarakat akan tetap mudik dengan cara apapun pada saat libur lebaran.

Sebenarnya kebijakan pemerintah tersebut sudah tepat jika bertujuan untuk menurunkan kasus Covid-19. Kebijakan tersebut dibuat karena pertama, kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai 1,6 juta lebih dengan jumlah kasus meninggal mencapai 45 ribu lebih. Di lihat dari tren kasus harian belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan karena masih fluktuatif. Kedua, berdasarkan tren kenaikan kasus di Indonesia terjadi setelah adanya libur panjang. Ketiga, mobilitas masyarakat yang tinggi ketika libur panjang. Ke empat, penerapan protokol kesehatan ketika libur panjang cenderung diabaikan.

Perlu Konsistensi

Berkaca dari kasus yang terjadi di India ledakan kasus Covid-19 disana yang diibaratkan seperti terjadinya gelombang tsunami. Maka kebijakan pemerintah untuk meniadakan mudik lebaran sudah cukup tepat. Kasus di India terjadi bermula dari perayaan hari besar di negara tersebut, selain itu masyarakat menganggap bahwa wabah sudah berlalu dengan turunnya kasus di negara tersebut.

Agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik, maka perlu ada konsistensi pemerintah dalam menerapkannya.

A Ahid Mudayana

Selama ini persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini salah satunya adalah inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Konsistensi kebijakan tersebut harus diwujudkan dalam penerapan di lapangan. Kebijakan tersebut harus dipahami seluruh lapisan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Jangan sampai kebijakan ini bersimpangan antara pusat dengan daerah. Dalam menerapkan kebijakan ini juga tidak boleh tebang pilih sehingga semua masyarakat diberlakukan aturan yang sama dalam penerapannya.

Ironisnya, sering kali kebijakan dibuat tidak berjalan secara konsisten. Bahkan cenderung bertentangan antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya. Dalam merumuskan sebuah kebijakan diperlukan sebuah analisa yang matang sehingga mampu memunculkan sebuah kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. Persoalan konsistensi dalam membuat dan menerapkan kebijakan ini harus segera diselesaikan pemerintah jika menginginkan pandemi ini segera berakhir.

Perubahan Perilaku

Selain masalah konsistensi kebijakan, hal yang tidak kalah penting dalam penanganan pandemi ini yakni perubahan perilaku masyarakat. Menurut teori Bloom, perilaku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Perlu dilakukan upaya mengubah perilaku masyarakat karena masih ada masyarakat berperilaku belum baik dalam menerapkan protokol kesehatan. Masih dengan mudah kita

temukan masyarakat tidak memakai masker dan berkerumun tidak menjaga jarak yang mengakibatkan penularan Covid-19 menjadi kurang terkendali dengan baik.

Substansi dari kebijakan peniadaan mudik ini tidak hanya sekadar mencegah mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lainnya. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu mengubah perilaku masyarakat untuk lebih taat lagi dalam menjalankan protokol Kesehatan, sehingga berdampak pada menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia. Perubahan perilaku tersebut tidak hanya dengan edukasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau satgas di wilayah masing-masing. Tetapi juga melalui intervensi dari sebuah kebijakan untuk menekan masyarakat agar mengubah perilaku dari belum taat menjadi taat terhadap protokol kesehatan. □

*) **A Ahid Mudayana,** *Wakil Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Pengda DIY, Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat UNS*

Pojok KR

Hindari penyekatan, pemudik cari jalur tikus.

-- **Mestinya setiap jalur tikus dijaga kucing.**

Petugas harus tegas bubarkan kerumunan.

-- **Tapi ingat, jangan diskriminatif.**

Okupansi perhotelan makin terpuruk.

-- **Serba dilematis.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkrk23@yahoo.com, iklandrkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.